

SKRIPSI

**PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK (STUDI: REKRUTMEN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI AMANAT
NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu
Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Oleh:

A.SHAFIRA DWI OCTAVIA

E041181323

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK

**(STUDI : REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DALAM PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2019)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar
Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

A.SHAFIRA DWI OCTAVIA

E041181323

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK (STUDI : REKRUTMEN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2019)**

Disusun dan Diajukan Oleh

A. SHAFIRA DWI OCTAVIA

E04118133

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Pada tanggal : 14 Juni 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.
NIP. 19791218200812002


Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.
NIP. 19680508202243001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK (STUDI : REKRUTMEN CALON ANGGOTA
LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2019)**

Disusun dan Diajukan Oleh:

A. SHAFIRA DWI OCTAVIA

E041181323

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si

Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.

Anggota : Haryanto, S.IP., M.A.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. SHAFIRA DWI OCTAVIA

NIM : E041181323

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perempuan dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019)" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Juni 2022



(A. SHAFIRA DWI OCTAVIA)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: "Perempuan dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019)". Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dengan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi Ayahanda Syamsuriady dan Ibunda Nilawati Rivai yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis.

Untuk kakak tersayang penulis Andi Ridha Agustin Iriany dan Ismail Rahim, terima kasih atas segala doa, motivasi dan dukungannya selama ini kepada penulis. Untuk adik tersayang Andi Kirana Aprilia, khususnya adik Andi Nizar Ahmad Riady terima kasih selalu bersedia direpotkan dan setia mendampingi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih untuk Ibu, Opa, Petta Ros, Alm. Etta, serta seluruh keluarga besar penulis yang tiada hentinya memberikan semangat, nasehat, dan doa.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kebaikan kepada mereka karena berkat doanya penulis bisa sampai ketahap ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan bapak Dr. Muh Imran, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan dan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan oleh banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran rektorat yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.

4. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Departemen Ilmu Politik : **Prof. Dr. Armin, Alm. Prof. Dr. Basir Syam M.Si, Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si, M.Ag, Drs. Andi Yakub, M.Si, Ph.D., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Dr. Muhammad Saad, M.A, Dr. Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.A, Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si, Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si, Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Endang Sari, S.IP, M.Si, Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP, M.IP, dan Dian Ekawaty, S.IP, M.A**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, **Ibu Musriati, Bapak Hamsah, Bapak Aditya** dan **Bapak Syam** yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi akademik.
7. Seluruh informan dari DPW PAN SULSEL, Bapak **Andi Irwandi Natsir**, Bapak **Ashabul Kahfi**, Ibu **Cherlina**, Ibu **Andi Khaerati**, dan Ibu **Andi Oci Alepuddin** yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Khususnya **Ibu Irma** yang telah memberikan data yang diperlukan

untuk menunjang skripsi ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.

8. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Seluruh teman-teman KKN UNHAS Gelombang 106 Wilayah Panakkukang 2, khususnya di Posko Masale, **Sisil, Moris, Aldy, Nadya, Fiva, Cinta, Lea, lis, Anjalie, Fauzi, Faris, Ida, Yusuf, dan Ridha** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga.
10. Saudara-saudari terbaik sepanjang perkuliahan, **ORMADO (Batari, Shinta, Jihan, Farah, Falih, Sasa, Utari, Nopi, Sofi), Moris, Anggy, Amirah, dan Auliya** yang selalu bersama dengan penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat tercinta penulis, **Bella Virgines, Algeransa Pricillia, dan Dewi Jumriana** yang selama ini selalu ada dikala suka dan duka, memberikan bantuan, dukungan, dan doa kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan penulis, **Kasandra, Cherry, Rezky Tandil, Nurul, Nurafni, Ica, dan Isky** yang persahabatannya masih hangat hingga saat ini, terima kasih selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dikala penat dalam urusan skripsi.

13. Teman berbagi penulis, **Andi Ismi Aqsa** dan **Andi Elsa Mulya Pratiwi** yang senantiasa memberikan semangat, mendengar keluhan kesah dan bertukar cerita perkuliahan dengan penulis.

14. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, namun telah membantu dalam penyelesaian studi.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan oleh keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sebagai makhluk biasa yang senantiasa ada dalam keterbatasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Makassar, 3 April 2022

A. Shafira Dwi Octavia

ABSTRAK

A. Shafira Dwi Octavia E041181323. Perempuan dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019). Di bawah bimbingan Sakinah Nadir sebagai Pembimbing Utama dan Muh Imran sebagai Pembimbing Pendamping.

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari partai politik. Dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif terdapat regulasi yang mewajibkan partai politik untuk mengajukan minimal 30% keterwakilan perempuan. Pada pemilu 2019, Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, namun belum terdapat calon anggota legislatif perempuan yang terpilih di DPRD Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan faktor penyebab tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Sulawesi Selatan. Teori yang digunakan yaitu teori rekrutmen politik dari Rush dan Altoff. Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan yang diterapkan Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah pola rekrutmen terbuka, yang membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya sebagai caleg, namun harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan pada peraturan partai. Adapun faktor penyebab tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan oleh: 1) faktor internal partai, 2) faktor ekonomi, 3) faktor kultural, dan 4) faktor popularitas.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Partai Politik, Perempuan

ABSTRACT

A. Shafira Dwi Octavia E041181323. Women and Political Parties (Study: Recruitment of Female Legislative Candidate National Mandate Party of South Sulawesi Province in 2019). Under the guidance of Sakinah Nadir as Main Advisor and Muh Imran as Companion Advisor.

Political recruitment is one of the functions of political parties. In the process of recruiting legislative candidates, there are regulations that require political parties to submit a minimum of 30% women's representation. In the 2019 election, the National Mandate Party of South Sulawesi Province has fulfilled the 30% quota for women's representation in legislative candidacy, but no female legislative candidates have been elected to the South Sulawesi DPRD.

This study aims to determine the pattern of recruitment of female legislative candidates in the National Mandate Party of South Sulawesi Province in 2019 and the factors causing the absence of female legislative candidates from the National Mandate Party elected in the South Sulawesi DPRD. The theory used is the theory of political recruitment from Rush and Altoff. The research basis used is qualitative research through descriptive analysis. The data collection techniques were carried out through interviews and documentation.

The results of this study indicate that the pattern of recruitment of female legislative candidates used by the National Mandate Party of South Sulawesi Province in 2019 is an open recruitment pattern, which opens opportunities for anyone who wants to nominate themselves as a candidate, but must meet the specified requirements in the party regulations. The factors that caused the absence of female legislative candidates from the National Mandate Party who were elected in the South Sulawesi Provincial DPRD were due to: 1) internal party factors, 2) economic factors, 3) cultural factors, and 4) popularity factors.

Keyword: Political Recruitment, Political Party, Women

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pendekatan Institusionalisme.....	10
2.2 Rekrutmen Politik.....	12
2.3 Konsep Partai Politik.....	15
2.3.1 Fungsi Partai Politik.....	16
2.4 Konsep Perempuan.....	20
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Kerangka Pemikiran.....	26
2.7 Skema Berpikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Lokasi Penelitian.....	29
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian.....	30
3.3 Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Partai Amanat Nasional.....	37
4.2 Gambaran PAN Provinsi Sulawesi Selatan.....	43
4.3 Profil Caleg Perempuan PAN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.....	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
5.1 Pola Rekrutmen Caleg Perempuan dalam PAN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.....	51
5.2 Faktor Penyebab Tidak Adanya Caleg Perempuan PAN yang terpilih di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	62
BAB VI PENUTUP.....	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Amanat Nasional pada tahun 2009-2019.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari berbagai Partai periode 2019-2024.....	6
Tabel 1.3	Susunan kepengurusan perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan periode 2015-2020.....	44
Tabel 1.4	Profil Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Dokumentasi 1 Wawancara langsung bersama Ashabul Kahfi (Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)
- Dokumentasi 2 Wawancara langsung bersama Andi Irwandi Natsir (Ketua Bappilu DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)
- Dokumentasi 3 Wawancara langsung bersama Andi Oci Alepuddin (Ketua Pemberdayaan Perempuan PAN SULSEL sekaligus Calon Anggota Legislatif Perempuan PAN SULSEL)
- Dokumentasi 4 Wawancara langsung bersama Cherlina (Calon Anggota Legislatif Perempuan PAN SULSEL)
- Dokumentasi 5 Wawancara langsung bersama Andi Khaerati (Calon Anggota Legislatif Perempuan PAN SULSEL)
- Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2017
- Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partai politik merupakan suatu kelompok dari beberapa orang yang dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama untuk kepentingan organisasi atau partai politik yang diusung. Tujuan dari kelompok atau partai politik tersebut adalah untuk dapat memperoleh suatu kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk dapat melaksanakan programnya.¹

Dalam dunia politik di Indonesia, partai politik memiliki suatu peran yang dapat dikatakan penting dalam suatu sistem pemerintahan yang demokrasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga sebagai sarana atau alat bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan untuk tujuan kesejahteraan. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi.

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dimana rekrutmen politik bertujuan untuk menyiapkan kader-kader partai agar dapat menjadi pemimpin dan mengisi jabatan politik. Hal ini berarti partai politik menjadi wadah rekrutmen politik dan sekaligus menyiapkan calon-

¹Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 403

calon pemimpin baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dari proses rekrutmen politik ini nantinya dapat melahirkan kader-kader partai yang potensial yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadi pejabat politik yang mampu mengawal dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Alat rekrutmen partai politik dalam proses dan pengisian jabatan politik haruslah melalui mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam proses rekrutmen politik, partai politik diharapkan mampu memberikan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia, meskipun telah menganut sistem demokrasi masih saja ditemukan dua persoalan mengenai perempuan dalam politik. *Pertama*, representasi perempuan cenderung sangat rendah. *Kedua*, ketidakmampuan partai politik dalam mengakomodir kepentingan perempuan.

Selama ini, dunia politik selalu diidentikkan dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya *image* yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya. Politik selalu dihubungkan dengan karakteristik laki-laki yang bersifat maskulin yaitu sifat keras, rasional dan kuat yang dianggap kontras dengan sifat-sifat keperempuanan yang feminin. Banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk dapat berkiprah di dunia politik karena perempuan memiliki sifat lemah lembut

dan dianggap lebih memakai perasaan dalam mengambil keputusan sehingga tidak cocok dalam pengambilan keputusan politik.²

Selain itu, adanya budaya patriarki yang masih mengakar kuat, karena masyarakat masih meyakini bahwa perempuan selalu identik dengan pekerjaan domestik yang bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami. Padahal pada dasarnya secara konstitusional perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."³

Satu langkah kongkrit untuk kesetaraan gender dalam politik adalah ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif di semua tingkat pada pasal 65 ayat I UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.⁴ Dalam UU tersebut dijelaskan, "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

²Pasaribu, Elvy. 2000. *Indonesia Masa Depan dari Perspektif Perempuan*. Salatiga : Yayasan Bina Darma. hal. xii

³Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1).

⁴Undang-Undang no.12 tahun 2003 tentang Pemilu 2004.

Undang-Undang tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan dalam dunia politik, sekaligus meningkatkan partisipasi politik di bidang politik serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terlibat dalam pengambilan suatu keputusan baik di dalam partai politik maupun di dalam lembaga pemerintahan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan, apalagi berkaitan dengan politik yang mengurus hajat hidup orang banyak termasuk kaum perempuan itu sendiri.

Partai Amanat Nasional merupakan salah satu partai politik yang besar di Indonesia. Pada pemilu 2019 di tingkat nasional, Partai Amanat Nasional menduduki peringkat 8 dengan mendapatkan 44 kursi.⁵ Selain itu, ditingkat provinsi pun Partai Amanat Nasional juga cukup baik seperti di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada pemilu 2014 yang lalu, Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 4 dengan perolehan suara sebanyak 406.880 suara dan terdapat 9 orang calon yang terpilih. Kekuatan Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan cukup diperhitungkan dengan menempati posisi wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan. Kemudian pada pemilu 2019, Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional. diakses pada 10 Februari 2022.

kembali menduduki peringkat 4 dengan total perolehan suara sebanyak 418.440 suara.

Jika dilihat dari pemenuhan peran dan partisipasi politik perempuan dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pileg tahun 2019 telah memenuhi persyaratan undang-undang yaitu sebanyak 30% keterwakilan perempuan. Berikut ini merupakan tabel yang memperlihatkan jumlah calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan periode Pemilu:

Tabel 1.1
Jumlah Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai
Amanat Nasional pada tahun 2009-2019

Periode	Laki-Laki	Perempuan	%
2009	70	15	18%
2014	54	31	37%
2019	53	32	38%

Sumber: Arsip Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 jumlah calon anggota legislatif perempuan masih cenderung sedikit dan belum mencapai kuota 30% yang ditetapkan undang-undang. Kemudian pada tahun 2014 dan 2019 terjadi kenaikan pada calon anggota legislatif perempuan sebanyak 31 orang dan 32 orang yang dimana jumlah tersebut telah memenuhi bahkan melewati kuota 30% keterwakilan

perempuan sebagai calon anggota legislatif. Namun berdasarkan jumlah ini belum mampu merepresentasikan perempuan untuk duduk di DPRD Sulawesi Selatan.

Meskipun kesempatan perempuan untuk terlibat di bidang politik cukup lebar dan adanya kebijakan yang mendukung perempuan untuk terlibat aktif, namun secara realitas keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik masih minim. Berikut ini merupakan tabel yang memperlihatkan jumlah anggota legislatif perempuan berdasarkan partai politik di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (periode 2019-2024).

Tabel 1.2
Jumlah Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari berbagai Partai
periode 2019-2024

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Total
Nasdem	8	4	12
PKB	8	0	8
PKS	3	5	8
Golkar	10	3	13
Gerindra	8	3	11
Demokrat	7	3	10
PAN	7	0	7
PPP	5	3	8
PDIP	6	2	8
Jumlah	62	23	85

Sumber: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel diatas, anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2024 berjumlah 23 orang dari total keseluruhan yaitu 85 anggota legislatif yang terpilih. Dalam hal ini, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak diduduki oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan 5 anggota legislatif perempuan. Sedangkan pada Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa tidak terdapat keterwakilan perempuan didalamnya.

Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan 7 kursi legislatif dari 11 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 7 kursi legislatif yang diperoleh PAN tersebut diisi oleh laki-laki dan tidak terdapat satupun perempuan yang terpilih menduduki kursi legislatif. Selain itu, pada pemilu 2009 dan 2014 juga tidak terdapat keterwakilan perempuan yang berasal dari Partai Amanat Nasional. Artinya, selama tiga periode pemilihan umum, Partai Amanat Nasional belum memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 dan apakah pola rekrutmen tersebut berpengaruh pada tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sehingga lebih lanjut ingin mengetahui faktor yang menjadi kendala calon anggota

legislatif perempuan Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis mengangkat judul penelitian “Perempuan Dan Partai Politik (Studi: Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah: *Bagaimana rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perempuan dan partai politik terkhusus dalam rekrutmen politik.

B. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas beberapa pendekatan, konsep serta teori yang dapat mendukung jalannya penelitian ini, yaitu: Pendekatan Institusionalisme, Teori Rekrutmen Politik, Konsep Partai Politik, dan Konsep Perempuan.

2.1 Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusionalisme yang sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.⁶

Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian

⁶David Marsh and Garry Stoker. 2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj. New York: Palgrave MacMillan. hal. 109

pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional.⁷

Jika melihat parlemen dalam pendekatan ini, maka yang akan dibahas yaitu mengenai kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tata tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi (pembagian dalam komisi, jenjang-jenjang pembicaraan) atau hasil kerjanya (berapa undang-undang telah dihasilkan).⁸

Pendekatan institusionalisme tidak menghiraukan organisasi-organisasi informal, seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya, dan juga media komunikasi. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Pendekatan institusionalisme lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal (a body of formal constitutional norms). Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.⁹

⁷ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.hal 72

⁸*Ibid.* hal 72

⁹*Ibid.* hal 73

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melihat pola rekrutmen politik Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan institusionalisme karena secara institusi Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan memiliki seperangkat aturan dan struktur yang membatasi.

2.2 Rekrutmen Politik

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.¹⁰

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan: "...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai."¹¹

Selain itu beberapa ahli juga memberikan beberapa definisi rekrutmen politik, seperti yang dikemukakan oleh Rush & Althof bahwa rekrutmen politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau

¹⁰Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal 408

¹¹*Ibid.* hal.408

mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal dan tidak formal. Formal disini artinya seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan posisi tidak formal seperti perekrutan aktivis, kader, dan berbagai bentuk propaganda-propaganda politik.

Menurut Rush dan Althoff (2007), pola rekrutmen politik terbagi atas dua yaitu: (1) pola tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga. Pola rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti teman dekat dari elit partai atau seseorang yang mempunyai kedekatan dengan partai, pengusaha, atau individu. (2) pola terbuka; adalah suatu sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka. Pola rekrutmen terbuka merupakan sistem rekrutmen yang memberikan kesempatan pada masyarakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan berkompeten, sehingga mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun pemerintahan.¹²

Adapun indikator dari Rush dan Althoff (2007), dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik pemimpin, sebagai berikut:¹³

¹²Rush, M, dan Althoff, P. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 247

¹³*Ibid.* hal 247

1. Penyediaan rekrutmen politik terhadap caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan partai politik dalam merekrut caleg melalui mekanisme, waktu dan sarana rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.
2. Kriteria rekrutmen politik pemimpin merupakan syarat atau kriteria caleg oleh partai politik dielaborasi dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif.
3. Kontrol rekrutmen politik Caleg, merupakan peran yang dilakukan partai politik dalam mengontrol jalannya rekrutmen Caleg.

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan. Seleksi yang dilakukan dimulai dari seleksi administratif, dan penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi partai. Terdapat beberapa pilihan bagi partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik, yaitu:¹⁴

- a) *Partisan*, yaitu orang-orang yang merupakan pendukung yang kuat, memiliki loyalitas tinggi terhadap partai sehingga dapat menduduki jabatan strategis biasanya datang dari kader internal partai.
- b) *Compartmentalization*, adalah proses rekrutmen berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang.

¹⁴Ariwibowo, Hendri. 2013. *Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan

- c) *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.
- d) *Civil Service Reform* (reformasi layanan publik) merupakan rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting, seperti non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Proses rekrutmen merupakan suatu hal yang penting, karena tahap ini merupakan tahap awal bagi partai politik untuk menghasilkan kader-kader politik yang baik. Dikarenakan setiap partai politik memiliki mekanisme yang berbeda, maka ada banyak faktor yang mendasari seseorang dapat direkrut oleh suatu partai, dengan pengertian bahwa partai politik menyesuaikan kebutuhan partai terhadap kader seperti apa yang mereka inginkan. Dengan prosedur seperti itu, setiap individu yang direkrut tentunya memiliki bakat atau kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk mengisi jabatan politik.

2.3 Konsep Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kedudukan politik dan

merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.¹⁵

Menurut Carl J. Friedrich bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil serta material.¹⁶ Sartori memberi pengertian partai politik sebagai kelompok politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan mampu menempatkan, melalui pemilihan umum, para calon untuk duduk dalam legislatif dan pemerintahan.¹⁷

Berdasarkan dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kelompok yang terorganisasi, ditandai dengan adanya visi, misi, dan tujuan yang sama serta mengikuti pemilihan umum untuk untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional guna melaksanakan programnya.

2.3.1 Fungsi Partai Politik

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi. Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik antara lain:

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

¹⁵Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hal 403

¹⁶*Ibid.* hal 404

¹⁷G. Sartori. 1976. *Parties and Party Systems*. University of Oxford. hal 63

Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.¹⁸

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu transmisi, pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku esensial dalam kaitannya dengan politik, agar mampu berpartisipasi efektif dalam kehidupan politik.¹⁹ Sosialisasi politik adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai

¹⁸Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. hal 406

¹⁹ Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Pramedia Group. hal 153

politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan untuk posisi-posisi strategis dalam pemerintahan baik formal maupun informal. Formal disini artinya seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen (eksekutif dan legislatif), sedangkan posisi tidak formal seperti perekrutan aktivis, kader, dan berbagai bentuk propaganda-propaganda politik.²⁰

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik Politik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku

²⁰Jack C. Plano, dkk. 1985. *Kamus Analisis Politik* (terj.). Jakarta : Rajawali. hal 211

bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Fungsi partai politik milik Miriam Budiardjo selaras dengan fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di Indonesia yaitu, Undang- Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuanbangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun,dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.²¹

Berdasarkan beberapa fungsi dalam partai politik diatas, partai politik menjadi salah satu aktor penting bagi tegaknya negara demokrasi. Hal ini dikarenakan partai politik menjadi sarana mobilitas aspirasi masyarakat dan pemerintah. Partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya antara warga negara dengan pemerintahnya.

2.4 Konsep Perempuan

Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminin. Sedangkan perempuan dalam pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Pada tahun 1970, Ann Oakley menggunakan istilah gender untuk menggambarkan perbedaan karakteristik laki-laki dan perempuan. Gender merupakan konstruksi sosial di mana dominasi peran laki-laki dalam

²¹Undang-Undang no.2 tahun 2008 tentang Partai Politik

sektor publik, sementara peran perempuan hanya dalam sektor domestik saja.²²

Pendapat mengenai gender juga dikemukakan oleh Mansour Fakih yang mendefinisikannya sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (social construction) dan kultural (cultural construction). Seperti anggapan, bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan.²³

Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami stereotip dalam persoalan peran sosialnya. Pada struktur sosial budaya tertentu, berlaku norma-norma sosial dimana perempuan diperankan sebagai kaum yang pantas untuk mengurus anak, suami dan bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, namun harus dibedakan dalam cara melihat persoalan ini lebih menekankan pada gender. Perempuan semata-mata hanya diposisikan pada ruang lingkup domestik dan reproduksi saja. Hal inilah yang menghambat kemajuan dari kaum perempuan untuk terjun ke ruang publik termasuk dunia politik.²⁴

²²A. Nunuk, P. Murniati. 2004. *Getar Gender*. Magelang : Indonesia Tera. hal 96

²³Fakih, Mansour.2004. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 11

²⁴ Puspitawati, Herien. 2012. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor : PT.IPB Press. hal 16

Identitas jenis kelamin (sex) dikonstruksikan secara alamiah, kodrati, yang merupakan pemberian khusus yang kita bawa sejak lahir. Karena itu, jenis kelamin mempunyai sifat yang tetap, permanen, dan universal. Sedangkan gender adalah seperangkat atribut dan peran sosial-kultural yang menunjukkan kepada orang lain, bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Tidak seperti jenis kelamin yang bersifat kodrati, gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural melalui proses sosial yang bersifat dinamis. Sesuai dengan asal usulnya, pembentukan gender didasarkan pada nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah sewaktu-waktu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perempuan dalam konteks gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah calon anggota legislatif perempuan Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Majid pada tahun 2020 dengan judul "*Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi pada DPD PDIP Jawa Tengah)*". Tujuan penelitian ini untuk untuk menjelaskan bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan oleh DPD PDIP Jawa Tengah sehingga caleg perempuan dapat lolos dengan kuantitas terbanyak dari partai lain. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik Pippa Norris yang membagi 3 tahap proses rekrutmen politik yaitu sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDIP Jawa Tengah pada pemilu 2019 terbuka (untuk kader dan non-kader) pada tahap sertifikasi, prosesnya tersentralisasi dengan memberi peran besar pada DPP, ada pemberian penghargaan kepada kader yang dinilai berjasa kepada partai (melalui pembobotan), dan bersifat netral gender karena bakal calon laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama.²⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Roni Tamara Saputra pada tahun 2016 dengan judul "*Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun

²⁵ Majid, Irsyad. 2020. *Pola Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan Pemilu 2019 (Studi pada DPD PDIP Jawa Tengah)*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan.

2014 pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan aktif di Partai Gerindra Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan cara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dalam perekrutan caleg perempuan dalam Pileg 2014 dilakukan secara terbuka. Adapun mekanisme rekrutmen yang dilakukan dengan 3 cara yaitu tahap administrasi, psikotes dan rekrutmen wawancara. Faktor yang menyebabkan perempuan aktif di Partai Gerindra karena pertama *behavioral beliefs* yaitu perempuan yang aktif di partai politik telah mengetahui apa keuntungan atau kerugian yang didapatkan ketika perempuan aktif di partai politik. Kedua norma subjektif yaitu adanya dukungan dari orang di sekitarnya seperti keluarga ketika seorang perempuan aktif di partai politik. Ketiga *control beliefs* merupakan kepercayaan perempuan terhadap faktor-faktor yang mampu memberi kemudahan dalam mewujudkan sebuah tujuan ketika aktif di partai politik.²⁶

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Firjie Asfahany pada tahun 2021 dengan judul "*Partai dan Rekrutmen Politik : Studi Atas Pemilihan Calon Legislatif Non Kader Oleh DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan Tahun 2019*". Penelitian ini bertujuan untuk

²⁶Saputra, Roni Tamara. 2016. *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Pada Partai Gerindra Kota Yogyakarta Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : Yogyakarta.

mengetahui mekanisme yang dilakukan DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan dalam menentukan calon legislatif dan faktor yang mempengaruhi DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan memilih calon legislatif di luar kader Partai Gerindra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teori yang dipakai adalah partai politik dan rekrutmen politik menurut Thoha. Hasil dari penelitian ini yaitu proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan bersifat rekrutmen terbuka. DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan mempunyai faktor pertimbangan mengapa mencalonkan non kader dalam pemilu legislatif, yaitu faktor desentralisasi partai, kader partai menolak dicalonkan dan yang ketiga modal popularitas non kader. Untuk mekanisme yang dilakukan ada dua tahap yaitu, penjaringan dan penyaringan, DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan melakukan pendaftaran secara terbuka dan nantinya calon-calon yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan maka ada ditetapkan menjadi calon legislatif. Terlihat jelas Partai Gerindra berorientasi kepada elektoral dan mengesampingkan fungsi partai politik sebagai pembentukan dan rekrutmen elite.²⁷

Dari ketiga penelitian di atas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang menjadi pembeda adalah pada penelitian ini penulis

²⁷ Asfahany, Firjie. 2021. *Partai dan Rekrutmen Politik "Studi Atas Pemilihan Calon Legislatif Non Kader Oleh DPC Partai Gerindra Tangerang Selatan Tahun 2019"*. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta.

akan menganalisis bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan apa faktor penyebab tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan melihat permasalahan menggunakan pendekatan institusionalisme dan menggunakan teori dari Rush dan Altoff.

2.6 Kerangka Pemikiran

Partai politik memiliki salah satu fungsi yaitu rekrutmen politik. Dalam proses rekrutmen politik, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja yang membedakan terdapat pada regulasi yang mengamanatkan kuota 30% pada keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting karena jumlah perempuan di ranah politik masih cenderung sedikit, sehingga posisi dan peran perempuan dalam ranah legislatif, dan juga dalam ranah eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim. Maka dalam hal ini, partai politik diharapkan mampu memberikan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Alat rekrutmen partai politik dalam proses dan pengisian jabatan politik haruslah melalui mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai Politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Terdapat dua macam pola rekrutmen

politik, yaitu rerutmen terbuka dan tertutup. Dalam pola tertutup, kesempatan hanya diberikan oleh sekompok orang saja misalnya elit-elit partai. Sedangkan, dalam pola terbuka semua orang yang memenuhi syarat diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga pemerintah.

Pada Pemilu 2019, Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam penentuan daftar calon tetap calon anggota legislatif dan memperoleh 7 kursi legislatif di DPRD Sulawesi Selatan. Namun meskipun begitu, kursi yang diperoleh tersebut semuanya diisi oleh laki-laki dan tidak terdapat satupun perempuan yang terpilih. Hal tersebut juga terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014, sehingga mengindikasikan bahwa selama 3 periode Pemilu, Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berawal dari uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat terlebih dahulu pola rekrutmen calon anggota legislatif perempuan dalam Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme, penelitian ini melihat bagaimana peraturan dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan. Setelah itu, mengetahui apa faktor penyebab tidak adanya calon anggota legislatif perempuan dari Partai Amanat Nasional yang terpilih di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

2.7 Skema Pikir

